

Judul : RUU Sisdiknas jalan wujudkan pendidikan inklusif
Tanggal : Kamis, 29 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 13

RUU Sisdiknas Jalan Wujudkan Pendidikan Inklusif

Idealnya semua sekolah merupakan sekolah inklusif agar lebih mendekati anak disabilitas pada akses pendidikan di sekolah.

FAUSTINUS NUA

faustinus@medialindonesia.com

MESKI ditolak masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas DPR tahun ini, agenda revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tetap dibutuhkan. Salah satu rajuannya untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang inklusif di Tanah Air.

Karena itu, Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong

partisipasi semua pihak untuk mengawal RUU tersebut. "Maka ini (RUU Sisdiknas) ialah waktu yang tepat untuk kita semua untuk sama-sama mengawal," katanya saat berbicara dalam Forum Diskusi Denpasar 12 Kesetaraan dan Inklusi RUU Sisdiknas secara daring, pada Rabu (28/9).

Ia menyebutkan pendidikan inklusif dan kesetaraan dalam UU Sisdiknas yang berlaku saat ini belum tampak sebagai payung hukum. Padahal, pendidikan yang adil, pendidikan sebagai hak semua anak bangsa tanpa terkecuali, jelas

tercantum dalam UUD 1945 yang menjadi dasar negara.

Pendidikan inklusif mulai dibicarakan secara khusus pada pertemuan UNESCO di Spanyol pada 1994. Disepakati bahwa pendidikan inklusif menjadi sebuah tujuan besar, keniscayaan yang bisa membuat dunia lebih manusiawi, lebih adil, dan lebih beradab. "Sesungguhnya, hal itu sama dengan apa yang dicita-citakan para *founding fathers* kita sebelum kemerdekaan," kata dia.

Buat transparan

Anggota Komisi X DPR Ratih

Megasari Singkarru menilai draf RUU Sisdiknas yang ada dianggap sudah memberikan ruang perbaikan tata kelola yang lebih inklusif bagi kelompok disabilitas dan kelompok rentan, guru PAUD, dan sejumlah isu lainnya. Namun, penolakan publik terhadap draf RUU Sisdiknas saat ini membuat hal itu tidak tampak.

Untuk itu, kata Ratih, pemerintah perlu melibatkan partisipasi publik secara luas dan transparan dalam perbaikan draf RUU Sisdiknas nantinya. "Sisi positifnya, penolakan ini

menjadi bukti meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan," kata ibu yang memiliki anak berkebutuhan khusus itu.

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbud-Ristek Anindito Aditomo mengatakan pemerintah memperkuat kebijakan inklusif yang sudah ada di dalam RUII Sisdiknas. Hal itu dilakukan dengan memuat pasal kelompok anak berkebutuhan khusus (ABK), termasuk disabilitas dan anak dengan kecerdasan istimewa.

"Kita juga memasukkan kategori anak rentan lainnya, misalnya anak yang sedang berhadapan dengan hukum atau anak yang tidak punya kewarganegaraan karena mereka pengungsi," kata dia.

Hal itu berangkat dari kebutuhan guru untuk ABK di Tanah Air yang masih jauh dari ideal lantaran adanya kewajiban sertifikasi guru.

Data saat ini, terdapat 35 ribu sekolah dengan jumlah siswa berkebutuhan khusus di sekolah inklusif sebanyak kurang lebih 127.500 siswa. Jumlah ini masih kurang karena idealnya semua sekolah merupakan sekolah inklusif. (II-2)